

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terbentuknya Kabupaten Sumedang bermula ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan pembagian wilayah administratif demi urgensi pemerintahan dan militer. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda membagi wilayah Pulau Jawa dalam tiga kawasan militer. Yaitu, Daerah Militer I *West Java*, Daerah Militer II *Midden Java*, dan Daerah Militer III *Oost Java*.¹ Hingga di tahun 1808-1809, Deandels melakukan perubahan pada sistem pemerintahan dengan menerapkan sistem sentralistis. Hal ini menyebabkan pulau Jawa terbagi dalam dua wilayah di antaranya:

1. *Cheribonsche-Preanger-Landen* (wilayah Cirebon-Priangan), yang mencakup Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, dan Limbangan (Garut);
2. *Bataviaasche-Preanger-Landen* (wilayah Batavia-Priangan), yang mencakup daerah Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Karawang.²

Pembagian wilayah ini sempat menimbulkan perlawanan dari Kesultanan Banten, namun pemerintah kolonial berhasil meredakan perlawanan ini. Selama penerapan sistem sentralistis ini, kawasan Sumedang menjadi bagian administratif dari wilayah *Bataviaasche-Preanger-Landen* Setelah penguasaan Deandels, Pulau Jawa berada dalam penguasaan Thomas Stanford Raffles, untuk memperkuat pengaruhnya, ia melanjutkan spirit Deandels dalam pemerintahannya. Akan tetapi Raffles justru mengembalikan pola pemerintahan ke dalam pemerintahan tidak langsung.³ Dasar konstitusi yang digunakan Raffles ia menerapkan struktur dualisme kepegawaian yakni *Inlands Bestuur* (pemerintahan pribumi) dan *Europees Bestuur* (pemerintahan Eropa).

¹ Edi S et al. Ekadjati, *Sejarah Pemerintahan Di Jawa Barat*. (Bandung: Pemerintah Provinsi Tingkat I Jawa Barat., 1993), hlm.22-23.

² Ani Ismarini, "KEDUDUKAN ELITE PRIBUMI DALAM PEMERINTAHAN PROVINCIE WEST-JAVA (1925-1942)" (Universitas Padjajaran, 2014).

³ Clive. Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), hlm. 192-193.

Selain menata ulang pola dan struktur pemerintahan, Raffles juga menerbitkan beberapa undang-undang terkait mengenai pembagian kawasan administratif yang terdiri dari empat tingkatan *gewest* (setelahnya disebut *residentie*) *afdeeling*, *district*, dan *onderdistrict*.⁴ Tatanan ini langgeng hingga awal abad ke-20. Tak lama berselang, kawasan Hindia Timur kembali dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Tepat di tahun 1903, pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Desentralisasi.

Peresmian undang-undang tersebut menjadi pertanda bahwa sistem pemerintahan telah beralih ke sistem desentralisasi, dimana terdapat pembaharuan dalam tatanan administrasi pemerintahan yang mulanya tradisional mulai berubah ke administrasi modern yang berfokus pada beberapa aspek di antaranya:

1. Pelimpahan wewenang dari pemerintah Kerajaan Belanda pada pemerintahan negara jajahan, dari pemerintahan negara jajahan pada departemen, dari departemen ke pejabat lokal, dari pejabat lokal ke pejabat pribumi.
2. Pendirian lembaga otonom yang mengatur tiap-tiap urusan administratif.
3. Diferensiasi pengelolaan keuangan negara jajahan dan pribumi.

Pengaplikasian sistem administrasi modern ini kemudian membentuk kawasan otonom⁵. pada perwujudannya, daerah otonom Pulau Jawa sendiri dibentuk di tahun 1905, dikenal dengan sebutan *gementee* (kota madya). Terdiri dari Buitenzorg (Bogor), Batavia (Jakarta), Meester-Cornelis (Jatinegara), Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Bukan itu saja, pemerintah kolonial juga mendirikan lembaga *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang dikemudian hari dikembangkan oleh pemerintah menjadi dewan provinsi. dalam ranah pekerjaannya, lembaga ini menerbitkan beberapa peraturan yang justru memperluas ruang bagi kalangan pribumi untuk terlibat dalam struktur pemerintahan di antaranya:

⁴ Ekadjati, *Sejarah Pemerintahan Di Jawa Barat.*, hlm. 15.

⁵ Marwati Djoened Posponegoro dan Nugroho Nutosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 54.

1. Bestuurshervormingswet 1922 (Staatsblad 1922 No. 216), tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi;
2. Regentschaps-ordonantie 1924 (Staatsblad 1924 No. 79), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten;
3. Stads-gemeente-ordonantie 1926 (Staatsblad 1926 No. 365), tentang Pembentukan Kotapraja di Pulau Jawa dan Madura.

Setelah penerbitan peraturan ini, Pulau Jawa terbagi ke dalam tiga wilayah administratif. Yakni, Provincie West-Java, Provincie Oost-Java dan Provincie Midden-Java. Tiap-tiap provinsi sendiri terdiri dari satu ibu kota, diikuti beberapa residentie (keresidenan), regentschap (kabupaten) dan stadsgemeente (kotamadya). Provinsi Jawa Barat menurut Lembaran Negara 1925 Nomor 378 tertanggal 14 Agustus 1925, terdiri dari sembilan residentie (keresidenan) yang mencakup enambelas regentschap (kabupaten) dan enam stadsgemeente (kotamadya). Berikut urutannya:

1. Keresidenan Bantam (Banten), yang terdiri atas Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak;
2. Keresidenan Batavia yang terdiri atas Kabupaten Batavia;
3. Keresidenan Buitenzorg (Bogor) yang terdiri atas Kabupaten Bogor;
4. Keresidenan Krawang terdiri atas Kabupaten Krawang;
5. Keresidenan West-Priangan terdiri atas Kabupaten Sukabumi dan Cianjur;
6. Keresidenan Midden-Priangan yang terdiri atas Kabupaten Bandung dan Sumedang;
7. Keresidenan Oost-Priangan terdiri atas Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis;
8. Keresidenan Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon dan Kuningan;
9. Keresidenan Indramayu yang terdiri atas Kabupaten Indramayu dan Majalengka.

Kabupaten Sumedang menjadi bagian kawasan administratif *Midden Priangan* di urutan ke-6. Dalam struktur pemerintahannya *afdeling* Sumedang terdiri atas asisten-residen, bupati, dan patih. Posisi *Afdeling* Sumedang sendiri menaungi beberapa distrik diantaranya, Distrik Sumedang, Distrik Tanjungsari,

Distrik Cibeureum, Distrik Conggeang, Distrik Darmawang, dan Distrik Darmaraja. Sayangnya, di tahun 1901 Distrik Darmawang dihilangkan. Kemudian tahun 1913 Distrik Cibeureum dan Conggeang diganti dengan Distrik Cimalaka dan Tomo. Hingga tahun 1925 *Afdeling* Sumedang memiliki lima distrik, yaitu Sumedang, Tanjungsari, Cimalaka, Tomo, dan Darmaraja.

Namun di tahun 1926-1942 Keresidenan Priangan dibagi lagi dalam tiga *afdeling*, yaitu *afdeling* Priangan Barat, dengan ibu kota Sukabumi yang menaungi Kabupaten Sukabumi dan Cianjur; *afdeling* Priangan Tengah dengan ibu kota Bandung yang menaungi Kabupaten Bandung dan Sumedang; *afdeling* Priangan Timur dengan ibu kota Tasikmalaya yang menaungi Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.⁶

Pada periode ini, elite pribumi di Sumedang, seperti bupati dan para pejabat daerah lainnya, ditempatkan dalam posisi yang strategis oleh pemerintah kolonial. Mereka dijadikan sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Kedudukan ini sering kali ambigu karena elite pribumi harus menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah kolonial dan aspirasi masyarakat setempat.⁷ Dalam menjalankan peran ini, elite pribumi memiliki otoritas terbatas yang diberikan oleh pemerintah kolonial, yang seringkali menciptakan situasi kompleks dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Dinamisasi politik selama periode ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang berupaya untuk memperkuat kontrol mereka atas daerah-daerah lokal, termasuk Sumedang. Kebijakan seperti desentralisasi terbatas pada 1905, dan kemudian lebih lanjut pada 1922, memberi ruang bagi keterlibatan elite pribumi dalam administrasi lokal, tetapi tetap dalam kerangka kekuasaan kolonial.⁸ Pada saat yang sama, muncul gerakan nasionalis yang menantang legitimasi pemerintah kolonial dan menuntut perubahan yang

⁶ Yong Mun Cheong, "Conflicts within the Prijaji World of Parahyangan West Java 1914-1927," ISAS Report Field no 1 Janua, no. Conflicts within the Prijaji World of Parahyangan West Java 1914-1927 (1973): hhm. 295-322).

⁷ L. Suryadinata, *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority, and China: A Study of Perceptions and Policies*. (Singapore: Marshall Cavendish Editions, 1989), 45.

⁸ S. Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1966), 67.

lebih mendasar dalam struktur pemerintahan. Hal ini menyebabkan elite pribumi sering berada dalam posisi sulit, terjepit antara keinginan untuk mempertahankan status quo yang memberikan mereka kekuasaan, dan tekanan dari gerakan nasionalis yang berkembang.

Tantangan utama yang dihadapi oleh elite pribumi di Kabupaten Sumedang selama periode ini adalah bagaimana mempertahankan otoritas mereka di hadapan masyarakat yang semakin kritis terhadap pemerintah kolonial. Dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat dan tekanan dari gerakan nasionalis, elite pribumi sering kali dipandang sebagai kolaborator pemerintah kolonial yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat⁹. Selain itu, keterbatasan kewenangan dan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial membatasi kemampuan mereka untuk bertindak independen atau membuat kebijakan yang benar-benar menguntungkan masyarakat lokal.

Semenjak tahun 1925 hingga 1942, Kabupaten Sumedang menghadapi dinamika yang rumit dalam berbagai bidang, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kaum elite pribumi pada masa itu berada dalam posisi yang krusial namun rentan dalam sistem pemerintahan kolonial, yang dipengaruhi oleh otoritas Belanda. Peran mereka tidak hanya menjalankan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi penghubung antara kepentingan kolonial dan masyarakat setempat. Penjajahan Belanda menimbulkan hambatan unik bagi kaum elite pribumi, yang memengaruhi semua aspek kehidupan mereka, termasuk pengambilan keputusan politik dan pelestarian budaya serta nilai-nilai tradisional mereka.

Kaum elite pribumi, seperti bupati dan pejabat tinggi lainnya, memiliki tempat partikular dalam sistem politik Sumedang, meskipun mereka juga terikat oleh norma-norma kolonial. Mereka seharusnya menjalankan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Belanda, tetapi mereka juga harus menjaga kredibilitas di mata orang-orang yang mereka awasi. Misalnya, penguasa

⁹ R. Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*. (Honolulu: University of Hawaii Press., 1999), 92.

kolonial sering melakukan praktik pemilihan dan pemberhentian pejabat daerah, yang membatasi kemampuan elit pribumi untuk melaksanakan tugas mereka.¹⁰

Kebijakan politik etis yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak pergantian abad ke-20 berdampak signifikan terhadap dinamika politik yang terbentuk selama masa itu. Program-program yang difokuskan pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat adat ini memberikan kesempatan bagi para elit masyarakat adat untuk menjadi peserta yang lebih aktif dalam pemerintahan daerah sambil tetap berada di bawah kekuasaan kolonial. Mereka sering dihadapkan pada dilema: memenuhi tuntutan pemerintah kolonial sambil juga membela kepentingan rakyatnya. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas peran elit dalam menjaga identitas dan martabat masyarakat adat dalam menghadapi otoritas kolonial.¹¹

Di bidang sosial, elit adat yang menduduki posisi penting merupakan individu penting dalam masyarakat. Namun, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Sumedang akibat penjajahan dan modernisasi, seperti pendidikan Barat dan sistem hukum baru, menimbulkan konflik antara tradisi dan inovasi. Identitas masyarakat Sunda bergantung pada kemampuan elit adat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah sambil menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Proses adaptasi ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi para elit yang ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka.¹²

Bangsawan pribumi menghadapi kesulitan ekonomi sebagai akibat dari praktik kolonial yang eksploitatif. Mereka sering kali terpaksa menerima skema ekonomi kolonial, seperti pajak tinggi dan kerja paksa, yang membebani masyarakat secara signifikan. Di sisi lain, pemimpin pribumi yang memiliki pengaruh ekonomi harus mampu mempertahankan stabilitas ekonomi lokal dan

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 120.

¹¹ ONGHOKHAM, *Rakyat Dan Negara Onghokham*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 230.

¹² Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 145.

kesejahteraan rakyatnya. Konflik kepentingan ini memicu kemarahan publik terhadap elit pribumi, yang dianggap terlalu dekat dengan otoritas kolonial.¹³

Budaya masyarakat Sumedang yang kaya akan tradisi dan ritual adat juga mendapat tantangan dari kebijakan kolonial yang bertujuan untuk mengintegrasikan cita-cita Barat. Kaum elit adat dihadapkan pada tantangan untuk mencapai keseimbangan antara mempertahankan budaya tradisional dan mematuhi norma-norma kolonial yang menginginkan asimilasi. Banyak dari mereka percaya bahwa kegiatan budaya seperti ritual adat dan kesenian daerah membantu melestarikan identitas lokal. Namun, tekanan dari pemerintah Belanda sering kali menghambat upaya ini.¹⁴

Agama merupakan komponen penting dalam dinamika elit adat. Islam merupakan inti masyarakat Sumedang, dan elit adat sering kali menjadi penjaga tradisi keagamaan. Akan tetapi, elit adat menghadapi kebijakan kolonial yang membatasi dominasi Islam di ranah publik. Mereka harus menunjukkan kesetiaan kepada penguasa kolonial sambil tetap menjaga kemurnian agama mereka di masyarakat. Konflik antara kepentingan agama dan otoritas kolonial menimbulkan tantangan bagi para elit dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.¹⁵

Interaksi antara elit pribumi dan kolonial menunjukkan ketegangan internal yang harus dihadapi oleh para elit ini. Mereka harus menjadi pejabat pemerintah kolonial sekaligus menjadi pembela dan pemimpin masyarakat setempat. Dalam menjalankan fungsi ini, mereka dihadapkan pada dilema moral dan politik yang sering kali membahayakan posisi mereka. Kebencian penduduk setempat, yang menganggap bahwa elit pribumi terlalu tunduk kepada Belanda, sering kali menjadi ancaman besar bagi keamanan mereka.¹⁶

¹³ Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan* (Jakarta: Gagas Media, 2005), 165.

¹⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka, 1981), 98.

¹⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, ed. Satriowahono Dkk (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 289.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Depok: Komunitas Bambu, 2015), 50.

Lebih jauh, para elit pribumi menghadapi kesulitan baru seiring tumbuhnya kesadaran nasionalisme dalam diri masyarakat pribumi, khususnya di kalangan pemuda. Gerakan nasionalisme yang tumbuh selama tahun-tahun ini mendesak para elit pribumi untuk bertindak lebih mandiri dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kolonial. Akan tetapi, keterbatasan kekuasaan mereka di bawah kendali kolonial sering kali membuat mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal.¹⁷

Dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut, para elit adat di Kabupaten Sumedang menunjukkan perjuangan untuk mengelola kerumitan tata kelola pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial. Mereka mencoba menemukan keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan otoritas kolonial dan mempertahankan dukungan dari penduduk setempat. Mempelajari posisi dan fungsi elit adat dalam konteks ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kolonialisme terhadap sistem pemerintahan daerah, serta berbagai masalah yang dihadapi elit adat dalam mempertahankan identitas dan integritas mereka dalam menghadapi kendali asing.

Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan di atas, terlihatlah bahwa kedudukan dan keterlibatan kalangan elite pribumi dalam pemerintahan masih hilang timbul dan cenderung dimanfaatkan untuk hegemoni pemerintahan kolonial Belanda saja. Maka kedudukan, dinamika politik, dan respon kalangan elite pribumi perlu diungkap secara menyeluruh terutama yang berkaitan dengan peran dan kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan lokal Kabupaten Sumedang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini membantu penulis memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai peristiwa yang dipilih, sehingga terhindar dari pembahasan di luar cakupannya.

Berdasarkan konsep di atas dapat terlihat bahwa kedudukan dan fungsi kalangan elite pribumi dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang masih dalam

¹⁷ Gie, *Zaman Peralihan*, 172.

keadaan bias dan sering ditempatkan pada kondisi dilema. Oleh karenanya dalam pandangan penulis topik ini dirasa perlu untuk diteliti secara lebih komprehensif. Dalam karya ilmiah ini akan di paparkan lebih spesifik mengenai *Kedudukan Elite Pribumi Dalam Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 1925-1942*. Dalam batas periodenya, penulis membatasi waktunya di tahun 1925-1942. Pemberian batas periode ini didasarkan pada peran kalangan elite pribumi dalam pemerintahan lokal pada masa pendudukan Belanda ketika wilayah Sumedang resmi berdiri sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Atas gambaran tersebut, penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan elite pribumi dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Sumedang dalam periode 1925-1942?
2. Bagaimana dinamika politik yang mempengaruhi peran dan kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan lokal?
3. Bagaimana kalangan elite pribumi menghadapi tantangan dalam menjalankan peran mereka dalam pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan akademis dari penelitian ini, juga merupakan tujuan utama dari setiap penelitian ilmiah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan di Kabupaten Sumedang dalam periode 1925-1942.
2. Memahami dinamika politik yang mempengaruhi peran dan kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan lokal.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh elite pribumi dalam menjalankan peran mereka dalam pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang sejarah lokal Kabupaten Sumedang serta peran elite pribumi dalam proses politik dan sosial pada masa tersebut. Temuan dari penelitian ini

dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang sejarah lokal dan sejarah politik Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan lokal dalam memahami dinamika sejarah Kabupaten Sumedang serta implikasinya dalam konteks kontemporer.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian kepustakaan atau disebut juga tinjauan pustaka merupakan langkah kedua yang memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah. Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lebih mendalam terhadap topik yang akan ditulisnya, maka dalam hal ini penulis akan memeriksa apakah ada makalah akademis lain yang ditulis sebelumnya dengan topik yang sama atau adakah makalah dengan topik yang sama fragmennya dari penelitian ilmiah penulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi dan plagiarisme serta membantu penulis dalam melakukan studi banding terhadap konteks dan informasi topik yang diteliti untuk pengembangan lebih lanjut.

Ada beberapa karya akademis yang memuat topik-topik yang beririsan dengan yang dibahas oleh penulis yaitu:

- a. *Pertama* artikel jurnal berjudul *Kedudukan Elit Pribumi Dalam Pemerintahan di Jawa Barat*. karya ilmiah yang ditulis oleh Ani Ismarini, dipublikasikan oleh Jurnal Sejarah Patanjala pada 2 Juni 2014. Jurnal ini membicarakan mengenai posisi dan porsi kalangan menak pribumi dalam pemerintahan pada masa kolonial hingga menjelang pendudukan Jepang.¹⁸ Perbedaan yang terdapat dalam karya ilmiah ini dengan tesis yang penulis angkat terletak pada lokus penelitian, dimana pada karya ilmiah ini lokus penelitian nya terletak di kawasan Provinsi Jawa Barat, sementara lokus penelitian dari judul yang penulis angkat berlokasi di Sumedang.
- b. *Kedua*, buku *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* karya Heather Sutherland. Karya dari Heather ini membicarakan elit birokrasi bentukan pemerintah kolonial Belanda (*pangreh praja*). Substansi yang terdapat pada

¹⁸ Ani Ismarini, "Kedudukan Elite Pribumi Di Jawa Barat (1925-1942)," *Patanjala* 6 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v6i2.193>.

buku ini membicarakan mengenai dinamika sistem politik masa kolonial yang melibatkan kalangan elit pribumi di pulau jawa.¹⁹ Perbedaan yang terdapat dalam buku ini dengan tesis yang penulis angkat pertama, terletak pada lokus penelitian, dimana lokus penelitian dari buku berlokasi di kawasan pulau jawa, sementara lokus penelitian dari judul yang penulis angkat berlokasi di Kabupaten Sumedang. Kedua, terletak pada aspek batasan periodisasi. Pada buku ini periodisasinya di batasi pada tahun 1800-1900 an, sementara dalam judul yang penulis angkat batasan periodisasinya dibatasi pada tahun 1925-1942.

- c. *Ketiga*, buku *Sejarah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. Karya dari Edi .S. Eka Djati, buku ini membahas mengenai pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1925-1942.²⁰ Perbedaan yang terdapat dala buku ini dengan tesis yang penulis angkat pertama terletak pada aspek lokus penelitian yang berkawasan di Provinsi Jawa Barat, sementara lokus penelitian dari judul yang penulis angkat berlokasi di Kabupaten Sumedang. Kedua, cakupan pembahasan penelitian pada buku ini mencakup tentang pembentukan dan pembagian wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan cakupan pembahasan penelitian pada judul yang penulis angkat mencakup tentang keterlibatan, peran dan respond kalangan elit pribumi di Kabupaten Sumedang dalam tatanan pemerintahan lokal.

Secara keseluruhan pembahasan yang menjadi kebaruan antara topik karya tulis yang telah dibuat sebelumnya dengan topik yang peneliti angkat terletak pada substansi pembahasan kedudukan elite pribumi sumedang yang mencakup tentang urgensi dan partisipasi kalangan menak *pangreh praja* dan menak santri di kabupaten Sumedang tahun 1925-1942.

F. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historis. Dari pendekatan ini, akan didapat realitas dalam bentuk *causal factors*. Untuk memperkuast pisau analisis dalam penelitian ini, kemudian penulis

¹⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

²⁰ Ekadjati, *Sejarah Pemerintahan Di Jawa Barat*.

menggunakan teori strukturalisme. Dalam pandangan teori strukturalisme peran elite pribumi dalam struktur pemerintahan lokal ditentukan berdasarkan kedudukan dan fungsi mereka dalam tatanan masyarakat dan tatanan pemerintahan.²¹ Melalui teori strukturalisme, dapat terlihat bahwa ruang gerak kalangan elite pribumi khususnya di Sumedang tidaklah sepenuhnya bebas dalam tatanan pemerintahan lokal, mereka tetap harus mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial.²²

Kaum elite pribumi tidak hanya menghadapi aturan-aturan Belanda yang keras, tetapi juga organisasi-organisasi oposisi nasionalis yang menyerukan reformasi dalam sistem kekuasaan. Konfrontasi ini memaksa para pemimpin pribumi untuk memilih antara mengikuti arahan-arahan kolonial dan menanggapi aspirasi-aspirasi rakyat mereka. Dalam konteks ini, strukturalisme menunjukkan bagaimana status mereka sebagai elite lokal terkait dengan dua kutub kekuasaan, kolonial dan nasionalis, yang memengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan mereka.²³

Kaum elit pribumi sering kali menjadi perantara antara penduduk lokal dan otoritas kolonial di bawah kerangka kolonial. Fungsi ini menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya bebas, tetapi diatur oleh mekanisme yang mengikat mereka pada tujuan kolonial. Dalam teori strukturalisme, posisi elit ini disebut sebagai 'peran struktural', di mana individu dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh struktur di atas mereka. Mereka harus menjaga kontak dengan otoritas kolonial sambil juga menjaga kepercayaan penduduk lokal. Tuntutan ini menempatkan mereka dalam situasi yang sulit.²⁴

Strukturalisme juga menyoroti bahwa elit adat tidak hanya dipengaruhi oleh kerangka formal pemerintah, tetapi juga oleh struktur sosial di dalam masyarakat, seperti konvensi budaya dan agama. Bangsawan adat Sumedang harus menyeimbangkan kepercayaan tradisional dengan ajaran Islam dalam

²¹ Claude Levi-Strauss, *Structural Anthropology* (London: The Penguin Press, 1969), 46.

²² L Althusser, *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)* (London: New Left Book, 1972), 85.

²³ A. Giddens, *Central Problems in Social Theory Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. (Oakland: University of California Press, 1979), 145.

²⁴ Lévi Strauss, *The Savage Mind* (Chicago: University of Chicago Press, 1966), 112.

kehidupan bermasyarakat. Kerangka sosial ini menentukan bagaimana elit melaksanakan tanggung jawab mereka, karena mereka harus mempertimbangkan perspektif masyarakat yang menghormati tradisi dan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa status mereka dipengaruhi tidak hanya oleh kebijakan kolonial tetapi juga oleh sistem sosial lokal.²⁵

Kaum elite pribumi dalam pemerintahan Sumedang menghadapi masalah tidak hanya dari kekuatan kolonial, tetapi juga dari konflik internal masyarakat. Mereka yang mencari kemerdekaan sering memandang kaum elite pribumi sebagai 'kolaborator' karena mereka merupakan bagian dari pemerintahan kolonial. Pandangan ini menekankan keterbatasan yang dialami kaum elite dalam menjalankan jabatan mereka. Menurut teori strukturalis, tanggung jawab mereka yang berlapis-lapis sebagai pejabat pemerintah dan pemimpin daerah menyebabkan ketidakbahagiaan di masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian dalam sistem kekuasaan.²⁶

Dalam proses penelitian penulis dalam meneliti bagaimana sistem kekuasaan kolonial membangun ketergantungan dan batasan, studi tentang elit pribumi menjadi lebih jelas di bawah pengaruh strukturalisme. Para elit ini dibatasi untuk mengikuti peraturan yang menguntungkan pemerintahan kolonial dan tidak memiliki fleksibilitas untuk mengejar inisiatif pro-rakyat. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kerangka kolonial merupakan elemen penentu dalam menjaga elit pribumi dalam posisi tunduk sambil mengendalikan perilaku mereka agar sejalan dengan tujuan Eropa. Dengan kata lain, kerangka kolonial membatasi tujuan dan prospek mereka untuk peran independen.²⁷

Dalam sosiologi, kedudukan atau status didefinisikan sebagai posisi yang ditempati oleh seseorang atau kelompok dalam struktur sosial. Status ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: *ascribed status* (kedudukan yang diperoleh melalui kelahiran, seperti ras, jenis kelamin, dan kelas sosial) dan *achieved*

²⁵ Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures. Basic Books," 1973, 89.

²⁶ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (England: Cambridge University Press, 1972), 67.

²⁷ MICHEL FOUCAULT, *POWER KNOWLEDGE* (Jogjakarta: BENTANG BUDAYA, 2002), 120.

status (kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau prestasi individu, seperti pendidikan atau karier)²⁸.

Perbedaan antara ascribed status dan achieved status merupakan tema sentral dalam banyak studi sosiologi. Ascribed status sering kali dianggap tidak adil karena berdasarkan faktor-faktor yang berada di luar kendali individu, sementara achieved status dianggap lebih adil karena didasarkan pada usaha dan kemampuan individu²⁹

Kedudukan sangat mempengaruhi identitas sosial seseorang, yaitu bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain dalam masyarakat. Identitas ini dapat membentuk bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain³⁰. Kedudukan juga terkait erat dengan konsep mobilitas sosial, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah ke kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur sosial. Mobilitas sosial sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial, yang semuanya dapat membentuk atau membatasi peluang seseorang untuk mengubah status sosial mereka³¹.

Istilah elit berasal dari bahasa Latin 'eligere', yang berarti 'memilih'. Frasa ini pertama kali digunakan pada abad ke-17 untuk merujuk pada pembelian barang-barang yang sangat penting, dan kemudian digunakan untuk merujuk pada kelompok sosial yang besar, seperti pasukan militer yang besar atau bangsawan yang besar. Gaetano Mosca menyatakan bahwa ada dua kelas dalam masyarakat mana pun, yaitu para pemimpin dan para pengikut. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih sedikit dan mengendalikan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan memperoleh semua keuntungan darinya. Suzanne Keller mendefinisikan elit sebagai sekelompok orang yang termotivasi untuk melayani kolektif dengan cara yang memiliki nilai sosial. T.B. Bottomore

²⁸ A. G. Johnson, *The Blackwell Dictionary of Sociology* (Oxford: Blackwell Publishers, 2000), 45.

²⁹ A. Smith, *Social Structures and Social Inequality*. (Boston: McGraw-Hill., 2005), 67.

³⁰ J. Turner, *The Structure of Sociological Theory*. (Homewood: Dorsey Press., 1982), 47.

³¹ P. Sorokin, *Social Mobility* (New York: Harper & Brothers., 1927), 89.

menyimpulkan bahwa istilah elit sekarang digunakan secara luas untuk merujuk pada kelompok fungsional dan pemimpin yang (entah karena alasan apa) memiliki kedudukan tinggi di masyarakat.³²

Penduduk asli secara historis terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari petani, dorpeling, dan dorpen. Kelompok ini disebut sebagai masyarakat biasa. Kelompok kedua terdiri dari para bangsawan, pejabat pemerintah, dan penduduk asli yang berpendidikan tinggi dan tinggal di lingkungan yang lebih baik, baik di kota maupun di pedesaan. Kelompok ini dikenal sebagai kaum elit atau Priyayi. Kaum elit adalah mereka yang memimpin, memengaruhi, mengorganisasi, dan membimbing rakyatnya sendiri di atas masyarakat umum. Kaum elit fungsional bertanggung jawab untuk menjaga fungsionalitas negara dan masyarakat kontemporer³³. Elit politik, di sisi lain, terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam aktivitas politik karena berbagai alasan, tetapi biasanya terkait dengan perubahan politik.

Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari kata Perancis bureau. Menurut sejarah, istilah bureau pertama kali digunakan pada awal abad ke-18 di Eropa Barat. Pengertian ini tidak hanya merujuk pada biro, tetapi juga kantor, seperti ruang kerja tempat karyawan bekerja, sedangkan awalan crania atau kratin berasal dari bahasa Yunani yang berarti "macht atau leiderschap". Dengan demikian, birokrasi merujuk pada kewenangan atau pengelolaan aktual dari aturan-aturan aparatur administrasi³⁴. Soehartono mengemukakan birokrasi merupakan aliran dari satu meja ke meja lainnya, artinya tugas-tugas tidak dibebankan pada satu meja saja, melainkan pada meja yang sangat panjang.³⁵ Dalam konteks ilmu sosial, birokrasi tumbuh ketika sebuah lembaga berkembang sampai pada titik di mana ia tidak dapat dikelola oleh satu atau dua pemimpin saja, tetapi harus diatur oleh komite-komite, yang masing-masing

³² Nina .H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Sunda, 1998), hlm. 8-10.

³³ Sartono Kartodirdjo, *Elite Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1983).

³⁴ Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003).

³⁵ Suhartono, *Politik Local, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lapera, 2001), hm. 55.

harus menangani area-area tertentu dengan kompetensi tertentu.³⁶ Menurut Blau dan Meyer, birokrasi adalah semacam organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar dan mengoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis. Dalam politik, birokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk aparatur pemerintahan.³⁷

Pembahasan tentang kepemimpinan akan didasarkan pada teori yang disampaikan oleh Max Weber dalam bukunya Sartono Kartodirdjo, yaitu otoritas legal-rasional, tradisional, kemudian karismatik.³⁸ Weber mengidentifikasi tiga tipe utama otoritas yang menjadi dasar bagi banyak studi tentang kepemimpinan: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Setiap bentuk otoritas ini memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan dijalankan dalam berbagai konteks sosial dan politik.

1. Otoritas legal rasional: Otoritas legal-rasional adalah bentuk otoritas yang didasarkan pada sistem hukum dan peraturan yang diterima secara umum. Dalam bentuk ini, kekuasaan seorang pemimpin berasal dari posisi atau jabatan yang dipegang, dan bukan dari karakteristik pribadi atau tradisi. Weber menyatakan bahwa dalam otoritas legal-rasional, aturan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi menjadi dasar legitimasi kekuasaan³⁹.
2. Otoritas tradisional: Otoritas tradisional adalah bentuk otoritas yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang telah lama ada. Dalam sistem ini, kekuasaan diwariskan atau diterima karena adanya kepercayaan terhadap nilai-nilai tradisional. Weber mengidentifikasi bahwa dalam otoritas tradisional, legitimasi berasal dari kepercayaan terhadap adat dan norma yang telah ada selama berabad-abad⁴⁰.

³⁶ Fauzie Ridjal, *Dinamika Budaya Dan Politik Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 155.

³⁷ Blau Peter M dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka raya, 2000), hlm. 4.

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1922), hlm. 50.

³⁹ M. Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*. (New York: Free Press., 1947), 328.

⁴⁰ Weber, 341.

3. Otoritas karismatik adalah bentuk otoritas yang didasarkan pada kualitas pribadi seorang pemimpin yang dianggap luar biasa oleh pengikutnya. Weber menggambarkan otoritas karismatik sebagai fenomena di mana kekuasaan dihasilkan dari kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain melalui pesona pribadi atau kemampuan yang dianggap luar biasa⁴¹

Kepemimpinan tradisional mengacu pada kepemimpinan elit yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan tradisional yang diperlukan dalam sistem sosial dan didasarkan pada kelahiran, uang, dan jabatan. Ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki peringkat sosial tertinggi memegang posisi kepemimpinan⁴² sedangkan orang-orang atau masyarakat menempati kelas bawah.

Kekuasaan adalah konsep sentral dalam ilmu sosial yang mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku orang lain dalam masyarakat. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang meskipun menghadapi perlawanan dari orang lain. Dalam konteks sejarah, kekuasaan sering dikaitkan dengan otoritas dan kontrol yang dimiliki oleh elite, yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan memerintah suatu kelompok atau komunitas⁴³.

Kekuasaan dapat dipahami melalui berbagai dimensi, termasuk kekuasaan yang bersifat koersif, yang melibatkan paksaan atau ancaman; kekuasaan yang bersifat insentif, yang melibatkan pemberian hadiah atau penghargaan; dan kekuasaan yang bersifat normatif, yang didasarkan pada kepercayaan dan nilai-nilai bersama⁴⁴. Dalam konteks pemerintahan kolonial, elite pribumi sering kali menggunakan kombinasi dari ketiga bentuk kekuasaan ini untuk mempertahankan otoritas mereka dan menjaga kestabilan di wilayah mereka.

⁴¹ Weber, 358.

⁴² Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, hlm. 275.

⁴³ Max Weber, *Economy and Society* (California: University of California Press, 1947), 152.

⁴⁴ Steven Lukes, *Power: A Radical View.*, (Macmillan, 1974), 35.

Menurut Max Weber, kekuasaan dalam masyarakat tradisional sering kali dikaitkan dengan legitimasi yang bersumber dari tradisi atau kharisma. Dalam kasus Kabupaten Sumedang, kekuasaan elite pribumi pada periode 1925-1942 bisa dikategorikan sebagai kekuasaan tradisional karena mereka memperoleh legitimasi dari warisan leluhur dan peran mereka dalam struktur adat lokal⁴⁵. Namun, meskipun mereka memegang kekuasaan tradisional, elite ini juga diharapkan untuk menjalankan perintah dari pemerintah kolonial.

Kekuasaan tidak hanya bergantung pada kemampuan memaksa, tetapi juga pada legitimasi atau penerimaan oleh mereka yang diperintah. Legitimasi ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk hukum, adat, atau kharisma. Dalam konteks Sumedang, elite pribumi memperoleh legitimasi baik dari tradisi lokal maupun dari pengakuan pemerintah kolonial yang memberikan mereka kekuasaan administratif tertentu⁴⁶.

Dalam pemerintahan kolonial, elite pribumi sering ditempatkan sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan kolonial. Mereka diberi otoritas untuk mengelola urusan lokal, tetapi harus tetap mematuhi kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Elite ini sering kali berada di posisi yang ambigu, harus menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban kepada pemerintah kolonial dan menjaga hubungan dengan komunitas lokal⁴⁷.

Pemerintahan kolonial sering kali menciptakan sistem dualisme kekuasaan, di mana ada pemerintahan kolonial resmi dan pemerintahan tradisional lokal yang berjalan paralel. Di Sumedang, dualisme ini terlihat dalam bagaimana elite pribumi tetap menjalankan peran mereka dalam struktur tradisional sambil memenuhi peran administratif mereka di bawah pemerintah kolonial. Hal ini menunjukkan adanya penggabungan antara kekuasaan tradisional dan birokratis yang memengaruhi dinamika politik lokal⁴⁸.

⁴⁵ Weber, *Economy and Society*, 212.

⁴⁶ Reinhard. Bendix, *Max Weber: An Intellectual Portrait*. (California: University of California Press, 1960), 325.

⁴⁷ B. R. O'G. Anderson, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism Verso," 2006, 92.

⁴⁸ Clifford. Geertz, *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. (Princeton: Princeton University Press, ., 1980), 119.

Teori hegemoni dari Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekuatan fisik atau paksaan, tetapi juga melalui pengaruh budaya dan ideologi yang membentuk cara berpikir dan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus Sumedang, elite pribumi menggunakan pengaruh mereka untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung status quo, baik dalam konteks tradisional maupun kolonial⁴⁹.

Elite pribumi sering kali berperan sebagai mediator antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Mereka memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah. Posisi ini memungkinkan mereka untuk berperan dalam kedua sisi, meskipun sering kali juga menempatkan mereka dalam situasi konflik kepentingan⁵⁰.

Periode kolonial merupakan masa transformasi besar dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Perubahan dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi telah mengubah cara kekuasaan dijalankan dan dipertahankan. Di Sumedang, perubahan ini tercermin dalam bagaimana elite pribumi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasi kolonial sekaligus mempertahankan relevansi mereka dalam sistem sosial tradisional⁵¹.

Kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan kolonial bukan hanya tentang pengaruh dan kontrol, tetapi juga tentang identitas dan kelangsungan peran mereka di masa depan. Kedudukan ini memberi mereka kekuasaan, tetapi juga membebani mereka dengan tanggung jawab dan harapan yang kompleks. Mereka diharapkan tidak hanya untuk menjaga ketertiban lokal, tetapi juga untuk mempromosikan nilai-nilai kolonial, sering kali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat mereka sendiri⁵².

⁴⁹ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (Princeton: International Publishers, 1971), 245.

⁵⁰ Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism and Indonesian Islam, Contacts and Conflict 1596-1950*, terj. Jan (Amsterdam: Rodopi, 1993), 180.

⁵¹ A Vickers, *A History of Modern Indonesia*. (Cambridge: Cambridge University Press., 2005), 77.

⁵² M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, edisi ke-3 (London: Palgrave, 2001), 198.

Berdasarkan konsep ini, keterikatan yang penulis angkat, perubahan tata kelola pemerintahan dari sistem kerajaan ke system kabupaten sedikit banyak menimbulkan konflik diantara kertajaan-kerajaan yang ada, terutama di kawasan Priangan. Tidak sampai disitu saja, perubahan tata kelola pemerintahan ini juga menimbulkan beragam respon dari kalangan Adipati yang menguasai wilayah Sumedang dalam proses perubahannya. Poin utama akhirnya adalah, tiap-tiap perubahan utamanya yang terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan tentunya memberikan pengaruh yang besar. Baik itu di sector politik, sosial, budaya hingga ekonomi.

G. Metodologi Penelitian

Berdasarkan topik dan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan, penelitian ini menggunakan metode sejarah. Louis Gostchalk dalam pendapatnya tegas menyatakan bahwa sejarah membutuhkan pengkajian lebih mendetail dan pemeriksaan atas kesaksian sejarah agar dapat mengungkapkan peristiwa dengan otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵³ Penelitian ini dilakukan langsung oleh penulis demi mendapatkan data valid yang kuat. Untuk memperoleh hal tersebut, penulis menempuh beberapa tahapan. Yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

a. Heuristik-Kritik

Penelitian ini dilakukan dengan bersandarkan pada kajian pustaka dengan pertimbangan terhadap topik yang dibahas serta batasan waktu yang ditetapkan oleh penulis. Dalam tahapan heuristik ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan. Mulai dari Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, dan terakhir penulis mengunjungi Perpustakaan Batoe Api. Pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis sejak 30 November 2023 hingga 12 Juni 2024. Cakupan substansi yang didapatkan penulis selama proses pengumpulan sumber sejauh ini cukup bersesuaian dengan lokus penelitian yang dipilih penulis, yakni wilayah Sumedang tahun 1924-1942.

⁵³ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.10.

Tahapan kedua yang dilakukan penulis adalah kritik sumber, di tahap ini peneliti menguji kebenaran dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan sesuai kategori sebelumnya.

G.J Reiner menyebutkan, heuristic artinya keterampilan menemukan, memproses, menguraikan bibliografi, mengurutkan dan merawat catatan-catatan.⁵⁴ Berdasarkan temuan sumber yang di dapatkan oleh penulis, sumber yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasi ke dalam dua kelompok, yakni:

1) Sumber Primer

a) Arsip

(1) *Conduite Staat van de Inlandsche Ambtenaren Residentie Preanger-Regentschappen Afdeling Soemedang Over Het Jaar 1917*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan surat keputusan pengangkatan Pangeran Aria Soeria Atmadja menjadi Bupati Keresidenan Priangan wilayah administratif Sumedang tahun 1917. Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber valid yang ditulis langsung departemen *Binlandsche Bestuur*. Dan dokumen tersebut pada bagian cover sebagian diketik dan sebagian lainnya menggunakan tulisan tangan tahun 1917.

(2) *Conduite Staat van de Inlandsche Ambtenaren Residentie Preanger-Regentschappen Afdeling Soemedang Over Het Jaar 1918*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan surat keputusan pengangkatan Pangeran Aria Soeria Atmadja menjadi Bupati Keresidenan Priangan wilayah administratif Sumedang tahun 1918. Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber valid yang ditulis langsung

⁵⁴ Abdurrahman, hlm. 55.

departemen *Binlandsche Bestuur*. Dan dokumen tersebut pada bagian cover sebagian diketik dan sebagian lainnya menggunakan tulisan tangan tahun 1918.

- (3) *Conduite Staat van de Inlandsche Ambtenaren behoorende bij het Departement van Binlandsche Besture Raden Toemenggoeng Aria Koesoemadilaga Residentie Preanger-Regentschappen Afdeling Soemedang Over Het Jaar 1925*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan surat keputusan pengangkatan Raden Toemenggung Aria Koesoemahdilaga menjadi Bupati Keresidenan Priangan wilayah administratif Sumedang tahun 1925. Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI di pastikan sumber ini merupakan sumber valid yang ditulis langsung departemen *Binlandsche Bestuur*. Dan dokumen tersebut pada bagian cover hingga halaman pertama diketik dan sebagian lainnya menggunakan tulisan tangan tahun 1925.
- (4) Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia), 1976. Secara internal dokumen arsip ini merupakan kumpulan naskah serah jabatan jajaran bupati Jawa Barat tahun 1921-1930. Dalam tahap kritik eksternal kumpulan dokumen arsip ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan dokumen tersebut pada bagian cover hingga bagian pertengahan halaman diketik dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan pada bagian tengah hingga akhir diketik dan menggunakan bahasa Belanda.
- (5) Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat I)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia), 1980. Secara internal dokumen arsip ini merupakan kumpulan naskah serah jabatan jajaran bupati Jawa Barat tahun 1931-1940. Dalam tahap kritik eksternal kumpulan dokumen arsip ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan dokumen tersebut pada bagian cover hingga

bagian pertengahan halaman diketik dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan pada bagian tengah hingga akhir diketik dan menggunakan bahasa Belanda.

- (6) *Regentschaps-ordonantie Statsblaad No 79 tahun 1924*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten; Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber valid yang ditulis langsung departemen *Binlandsche Bestuur*. Akan tetapi pada beberapa bagian dokumen tersebut mengalami robek yang disebabkan karena kondisi kertas yang mengalami pelapukan akibat faktor usia.
- (7) *Lembar Negara No. 378 tahun 1925 tentang PERUBAHAN PEMERINTAHAN. DESENTRALISASI JAWA BARAT. Pembentukan Provincie West Java*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan dokumen putusan pemerintah Kolonial Belanda tentang pemberlakuan sistem desentralisasi dalam pembentukan *Provincie West Java*; Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber valid yang ditulis langsung departemen *Binlandsche Bestuur*. Kondisinya masih terbaca jelas tulisannya sebab merupakan hasil ketikan mesin tik.
- (8) *Arsip Lembar Negara No. 425 tentang PERUBAHAN. PEMERINTAHAN JAWA BARAT*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara internal dokumen tersebut merupakan dokumen putusan pemerintah Kolonial Belanda tentang perubahan pemerintahan Provinsi Jawa Barat; Dalam tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber valid yang

ditulis langsung departemen *Binlandsche Bestuur*. Kondisinya masih terbaca jelas tulisannya sebab merupakan hasil ketikan mesin tik.

b) Buku

- (1) Wijnand Kerkhoff, *Het Paradijs van Java*, (Amsterdam; Holand: Koninklijke Bibliotheek), 1939. Secara internal buku tersebut berisikan mengenai catatan perjalanan Wijnand Kerkhoff yang melakukan perjalanan berkeliling ke daerah timur tatar Sunda, salah satunya Sumedang. Kemudian, dengan antusias memberikan Sumedang julukan *Paridjs van Java*. Di dalam buku ini Kerkhoff juga memaparkan mengenai kondisi sosial masyarakat Sumedang, sekaligus gambaran mengenai kondisi ekologi dan budaya kabupaten Sumedang masa itu. Buku ini mulanya diterbitkan untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Sumedang masa itu. Dalam tahap kritik eksternal buku ini merupakan diterbitkan tahun 1939 oleh Koninklijke Bibliotheek. Yang sudah di digitalisasi ke dalam format file PDF dengan tebal 68 halaman.

2) Sumber Sekunder

- (1) Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) LTD), 1979. Secara Internal buku tersebut berisikan mengenai dinamika sistem pemerintahan di tanah Jawa yang mulanya berbentuk kerajaan, kemudian berubah ketika masa pendudukan kolonial Belanda menjadi sistem pemerintahan langsung dan tidak langsung pada pertengahan abad ke-20. Pada tahap kritik eksternal buku tersebut merupakan cetakan pertama yang disusun dan diterbitkan pada tahun 1979 oleh penerbit Heinemann Educational Books (Asia) LTD. Cover buku terbuat dari bahan semi hard cover yang bagian dalamnya sudah menguning, kertas nya pun sudah menguning namun tulisannya masih bagus dan terbaca dengan sangat jelas. Tebal halaman dari buku ini sejumlah 182 halaman.
- (2) Nina Herlina Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda), 1998. Secara Internal buku tersebut berisikan mengenai gambaran kehidupan kaum menak di Priangan

dalam periode 1800-1942. Lebih detail lagi Prof. Nina dalam karyanya ini membahas mengenai keterlibatan kalangan kaum menak dalam kontestasi politik di era kolonial hingga masa pendudukan Jepang. Pada tahap kritik eksternal buku tersebut merupakan cetakan pertama yang disusun dan diterbitkan pada tahun 1998 oleh Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. Cover buku terbuat dari soft cover yang sudah memudar kertasnya sudah mulai menguning namun tulisannya masih bagus dan terbaca dengan sangat jelas. Tebal halaman dari buku ini sejumlah 343 halaman.

- (3) Nina Herlina Lubis dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat* (Bandung: Yayasan MSI), 2011 Secara Internal buku tersebut berisikan mengenai gambaran kehidupan masyarakat Jawa Barat mula dari masuknya agama Islam hingga masa kolonial, dimana pada tulisan ini juga memaparkan dinamika kehidupan religious utamanya kehidupan tiga pesantren tua yang terdapat di daerah Kabupaten Sumedang, yakni Pesantren Cikalama, dan Asyrofudin. Pada tahap kritik eksternal buku tersebut merupakan cetakan pertama dengan cover semi hard cover yang diterbitkan oleh Yayasan MSI. Tebal halaman dari buku ini berjumlah 368 halaman.

b. Interpretasi-Rekontruksi

Setelah melalui tahap pengumpulan sumber (heuristik), uji validitas sumber dalam aspek fisik maupun substantif (kritik, intern dan ekstern), langkah selanjutnya yang dilakukan penelii adalah interpretasi atau menafsirkan fakta. Dalam tahap ini penulis kemudian membuat sebuah rekontruksi dari hasil pengolahan sumber sebelumnya, sehingga dapat menampilkan paparan peristiwa sejarah utuh yang dapat dipahami hubungan kausalitasnya. Proses penafsiran fakta ini disebut juga dengan istilah interpretasi historis.⁵⁵

1) Interpretasi Verbal

Interpretasi ini dilakukan berdasarkan aspek linguistik, mulai dari bahasa, kosa kata (vocabulary), tata bahasa, konteks dan terjemahan. Interpretasi verbal dalam penelitian sejarah mengenai kedudukan elite pribumi di Kabupaten

⁵⁵ Gilbert Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 321-330.

Sumedang memerlukan pendekatan yang sistematis dan mendalam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan data verbal dari sumber-sumber yang kredibel, seperti wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang sejarah lokal atau keturunan elite pribumi. Proses pengumpulan data ini harus dilakukan dengan teknik wawancara mendalam untuk menggali informasi yang detail dan spesifik. Menurut Ricoeur⁵⁶, metode ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas sejarah secara akurat.

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah validasi dan triangulasi informasi. Validasi dilakukan dengan cara mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh narasumber melalui perbandingan dengan sumber-sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, atau catatan sejarah lainnya. Triangulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang didapat dari sumber verbal memiliki dukungan bukti yang cukup kuat. Denzin⁵⁷ menekankan pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan.

Langkah ketiga dalam interpretasi verbal adalah proses transkripsi dan analisis teks. Data verbal yang sudah dikumpulkan dan divalidasi harus ditranskripsikan secara detail dan akurat. Proses ini memerlukan ketelitian agar tidak ada informasi yang hilang atau terdistorsi. Setelah transkripsi selesai, teks tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang relevan dengan kedudukan elite pribumi di Sumedang. Poland⁵⁸ menjelaskan bahwa kesalahan dalam transkripsi dapat mengubah makna informasi, sehingga akurasi sangat penting dalam tahap ini.

Interpretasi data verbal kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya yang melatarbelakangi informasi yang diberikan oleh narasumber. Peneliti harus memahami situasi sosial, politik, dan ekonomi pada masa yang diteliti untuk memberikan interpretasi yang tepat. Menurut

⁵⁶ Paul Ricoeur, *Time and Narrative*. (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 123.

⁵⁷ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (McGraw: Hill, 1978), 302.

⁵⁸ Blake D Poland, “‘Transcription Quality’ Qualitative Inquiry” Vol. 1 (1995): 290.

Geertz⁵⁹, interpretasi yang baik harus memasukkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan struktur sosial masyarakat untuk memberikan gambaran yang akurat tentang peran dan fungsi elite pribumi di Sumedang.

Terakhir, hasil interpretasi verbal disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Laporan ini harus mencakup temuan utama, metode pengumpulan data, dan analisis yang digunakan, serta refleksi kritis terhadap proses interpretasi. Carr⁶⁰ menyatakan bahwa penyajian hasil penelitian sejarah harus dilakukan dengan jelas dan sistematis untuk memberikan pembaca pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, interpretasi verbal yang tepat akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kedudukan dan peran elite pribumi di Kabupaten Sumedang dalam konteks sejarah.

2) Interpretasi teknis

Tahap ini di sandarkan pada dua faktor, yakni: Pertama, tujuan pembuatan dokumen. Kedua, pola penulisan yang tepat. Hal ini dapat menunjukkan apakah kehadiran dokumen yang dimiliki peneliti bertujuan untuk menyampaikan informasi atau justru terdapat tujuan lainnya. Interpretasi teknis dalam penelitian sejarah melibatkan penggunaan metode dan teknik khusus untuk menganalisis data dan sumber sejarah secara mendalam. Dalam penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Kabupaten Sumedang, langkah pertama adalah melakukan pengumpulan dan pengarsipan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Ini bisa meliputi surat-surat resmi, arsip pemerintah, catatan kolonial, dan dokumen pribadi seperti surat atau catatan keluarga elite pribumi. Pengumpulan dokumen ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua informasi yang relevan tercakup. Menurut Tosh⁶¹, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis dokumen yang diperlukan dan cara mengaksesnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

⁵⁹ Geertz, "The Interpretation of Cultures. Basic Books," 27.

⁶⁰ E.H Carr, *What Is History?* (Macmillan, 1961), 35.

⁶¹ John Tosh, "The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History.," *Routledge*, 2015, 79.

Langkah kedua adalah melakukan kritik sumber untuk mengevaluasi keaslian, kredibilitas, dan relevansi dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua jenis: kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berkaitan dengan autentikasi dokumen, seperti memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan bukan palsu. Sementara itu, kritik internal melibatkan analisis isi dokumen untuk menilai keakuratan dan bias yang mungkin ada. Howell dan Prevenier⁶² menjelaskan bahwa kritik sumber adalah langkah penting dalam penelitian sejarah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan dan tepat.

Setelah dokumen-dokumen tersebut dievaluasi, langkah berikutnya adalah analisis konteks. Ini melibatkan pemahaman tentang latar belakang sejarah, sosial, dan politik dari periode waktu yang diteliti. Dalam konteks kedudukan elite pribumi di Sumedang, analisis ini harus mencakup pemahaman tentang struktur sosial masyarakat pada masa itu, hubungan antara elite pribumi dan pemerintah kolonial, serta dinamika sosial yang mempengaruhi peran mereka. Sejarawan harus memahami konteks ini untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap data yang ada. Burke⁶³ menekankan pentingnya analisis konteks dalam membantu peneliti memahami bagaimana faktor-faktor historis mempengaruhi peran dan tindakan individu atau kelompok dalam sejarah.

Langkah keempat adalah melakukan sintesis data, di mana peneliti menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membentuk gambaran yang kohesif tentang topik yang diteliti. Sintesis ini harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan informasi yang berbeda untuk memberikan analisis yang menyeluruh. Dalam penelitian tentang elite pribumi di Sumedang, sintesis ini dapat mencakup penggabungan data dari dokumen-dokumen kolonial, catatan resmi lokal, dan sumber lisan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran dan kedudukan mereka. Tosh⁶⁴

⁶² Walter. Howell, Martha, and Prevenier, "From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods.," *Cornell University Press*, 2001, 81.

⁶³ Peter Burke, "What Is Cultural History?," *Polity Press*, n.d., 43.

⁶⁴ Tosh, "The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History.," 113.

menunjukkan bahwa sintesis data adalah langkah penting untuk mengintegrasikan berbagai bukti dan membentuk narasi yang koheren.

Terakhir, hasil dari interpretasi teknis ini harus disajikan secara sistematis dalam laporan penelitian. Laporan ini harus mencakup semua temuan utama, metode analisis yang digunakan, dan refleksi kritis terhadap proses interpretasi. Penyajian ini penting untuk memberikan pembaca pemahaman yang jelas tentang kedudukan elite pribumi di Sumedang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. White ⁶⁵menekankan bahwa penyajian hasil penelitian sejarah harus dilakukan dengan jelas dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan memungkinkan pembaca mengevaluasi validitas interpretasi yang dibuat.

3) Interpretasi Logis,

Interpretasi logis adalah penafsiran fakta berdasarkan cara berpikir yang benar, maka peneliti diharuskan untuk menafsirkan sumber dokumen yang dimiliki secara menyeluruh dengan cara berpikir yang sesuai. Interpretasi logis dalam penelitian sejarah bertujuan untuk membangun argumen yang koheren dan konsisten berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Dalam konteks penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Kabupaten Sumedang, interpretasi logis memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber sejarah, termasuk dokumen tertulis, catatan resmi, dan sumber lisan. Langkah pertama dalam interpretasi logis adalah melakukan identifikasi dan seleksi bukti yang relevan. Peneliti harus memilih data yang dapat mendukung argumen mereka secara logis dan menyaring informasi yang tidak relevan atau tidak dapat dipercaya. Seperti yang diungkapkan oleh Marwick ⁶⁶, peneliti harus memastikan bahwa bukti yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

Langkah kedua adalah melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti harus membandingkan informasi dari

⁶⁵ Hayden. White, "Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe," *Johns Hopkins University Press*, 1973, 65.

⁶⁶ Arthur Marwick, "The Nature of History," *Macmillan*, 1989, 23.

berbagai sumber untuk mencari kesamaan, perbedaan, dan kontradiksi. Dalam hal ini, penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Sumedang mungkin melibatkan perbandingan antara catatan kolonial, dokumen pemerintah lokal, dan kesaksian lisan masyarakat. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif yang berbeda dan mengidentifikasi bias yang mungkin ada dalam sumber-sumber tersebut. Tosh ⁶⁷ menekankan bahwa analisis komparatif adalah kunci dalam mengidentifikasi kebenaran sejarah dan membangun argumen yang logis.

Setelah melakukan analisis komparatif, langkah ketiga adalah menyusun argumen yang logis dan koheren berdasarkan temuan-temuan tersebut. Argumen harus disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara berbagai peristiwa dan fenomena sejarah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi tertentu mempengaruhi kedudukan elite pribumi di Sumedang. Argumentasi yang logis harus didasarkan pada bukti yang jelas dan konsisten serta harus memperhitungkan semua faktor yang relevan. Howell dan Prevenier ⁶⁸ menjelaskan bahwa argumen yang logis harus dibangun di atas dasar bukti yang kuat dan harus mampu menjawab pertanyaan penelitian secara meyakinkan.

Langkah keempat dalam interpretasi logis adalah evaluasi kritis terhadap argumen yang telah disusun. Peneliti harus mengidentifikasi kelemahan atau keterbatasan dalam argumen mereka dan mempertimbangkan pandangan alternatif yang mungkin. Dalam penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Sumedang, evaluasi kritis ini mungkin melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti bias kolonial dalam dokumen resmi atau keterbatasan dalam kesaksian lisan. Dengan mengevaluasi argumen mereka secara kritis, peneliti dapat memperkuat posisi mereka dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan

⁶⁷ Tosh, "The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History.," 98.

⁶⁸ Howell, Martha, and Prevenier, "From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods.," 99.

benar-benar logis dan koheren. Carr ⁶⁹ menekankan pentingnya refleksi kritis dalam memastikan validitas dan kekuatan argumen sejarah.

Langkah terakhir adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk yang terstruktur dan jelas. Laporan penelitian harus menyajikan argumen dan bukti secara logis, dengan setiap bagian saling berkaitan untuk membentuk narasi yang kohesif. Penyajian ini harus memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran peneliti dan memahami bagaimana bukti mendukung kesimpulan yang dibuat. Sejarawan harus mampu menjelaskan argumen mereka secara jelas dan meyakinkan, serta menunjukkan bagaimana mereka telah mencapai kesimpulan tersebut. White ⁷⁰ menekankan bahwa penyajian hasil penelitian sejarah harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan dalam proses interpretasi logis.

4) Interpretasi Psikologis

Interpretasi psikologis menjadi upaya dari peneliti dalam mempelajari sudut pandang dari pembuat dokumen. Interpretasi ini mencakup dua aspek yakni umum dan individu. Aspek umum mengacu pada pola pikir masyarakat banyak sementara aspek individu mengacu pada cara berpikir tertentu yang bisa tertuang dalam rubrik tulisan majalah, dokumenter ataupun karya-karya lainnya. Langkah pertama dalam interpretasi psikologis adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat memberikan wawasan tentang kondisi psikologis para elite pribumi. Sumber-sumber ini termasuk arsip surat pribadi, memoar, laporan resmi pemerintah kolonial, serta wawancara dan cerita lisan yang mungkin masih tersedia. Misalnya, surat-surat pribadi yang ditulis oleh bupati atau pejabat tinggi lainnya dapat mengungkapkan pemikiran mereka tentang hubungan dengan Belanda dan rakyat mereka sendiri ⁷¹. Sumber-sumber ini membantu mengidentifikasi sikap dan perasaan elite pribumi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Sumedang selama periode tersebut.

⁶⁹ Carr, *What Is History*, 56.

⁷⁰ White, "Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe," 81.

⁷¹ Anderson, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism Verso," 125–26.

Setelah mengumpulkan sumber-sumber, langkah berikutnya adalah menganalisis konteks sejarah dan psikologi sosial dari periode tersebut. Ini termasuk mempelajari bagaimana struktur sosial dan politik saat itu mempengaruhi mentalitas dan perilaku elite pribumi. Misalnya, sistem pemerintahan kolonial Belanda sering kali memanipulasi struktur kekuasaan lokal untuk mempertahankan kontrolnya, yang dapat mempengaruhi rasa identitas dan loyalitas elite pribumi⁷². Memahami faktor-faktor sosial seperti ini penting untuk menginterpretasi bagaimana elite pribumi menavigasi identitas mereka antara dua dunia yang berbeda: dunia tradisional mereka dan dunia modern kolonial.

Langkah selanjutnya adalah menilai bagaimana kebijakan kolonial mempengaruhi psikologi individu dan kolektif elite pribumi. Kebijakan seperti sistem tanam paksa atau kerja paksa dapat menciptakan tekanan psikologis yang signifikan pada para elite yang sering kali berada di persimpangan antara kewajiban mereka kepada pemerintah kolonial dan tanggung jawab mereka kepada rakyat mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal yang mendalam, mempengaruhi cara mereka memandang peran mereka dan keputusan yang mereka buat dalam menjalankan pemerintahan lokal⁷³.

5) Interpretasi Faktual

Penjelasan seperti ini tidak didasarkan pada kata-kata tetapi berdasarkan fakta. Dalam hal ini yang ditekankan adalah membiarkan fakta berbicara sendiri tanpa memerlukan multitafsir, sehingga penafsirannya realistis.

Proses interpretasi yang dilalui oleh penulis sendiri, terhadap Judul *Kedudukan Elite Pribumi Dalam Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 1925-1942*. dominan menggunakan interpretasi logis dan psikologis ketika memaparkan peristiwa secara keseluruhan, hal ini didasarkan dari teori yang penulis gunakan, yakni teori Sejarah Kritis Samuel Philips Huntington. Sementara interpretasi lainnya penulis aplikasikan dalam proses pengolahan sumber.

⁷² Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 205.

⁷³ Vickers, *A History of Modern Indonesia.*, 150.

Interpretasi faktual dalam penelitian sejarah menekankan pada penggunaan data dan bukti yang akurat untuk membangun pemahaman yang jelas dan obyektif tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Kabupaten Sumedang, interpretasi faktual melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar faktual dan dapat dipercaya. Langkah pertama adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah primer yang relevan, seperti arsip kolonial, catatan resmi pemerintah, dan dokumen pribadi dari elite pribumi. Sumber-sumber ini harus dianalisis secara hati-hati untuk memastikan keasliannya. Menurut Howell dan Prevenier⁷⁴, sumber primer adalah bahan mentah penelitian sejarah yang memberikan bukti langsung tentang peristiwa masa lalu

Langkah kedua adalah kritik sumber, yang merupakan proses evaluasi keandalan dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal berfokus pada aspek fisik dokumen, seperti usia, kondisi, dan keasliannya, untuk memastikan bahwa sumber tersebut bukan palsu atau modifikasi. Kritik internal, di sisi lain, berkaitan dengan konten sumber dan bertujuan untuk mengidentifikasi bias, perspektif, atau kepentingan yang mungkin mempengaruhi informasi yang disajikan. Carr⁷⁵ menegaskan bahwa kritik sumber adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah valid dan tidak menyesatkan.

Setelah melakukan kritik sumber, langkah ketiga adalah mengonfirmasi fakta-fakta dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda. Ini melibatkan triangulasi data, di mana peneliti mencari konsistensi dan perbedaan antara sumber-sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan informasi. Dalam penelitian tentang kedudukan elite pribumi di Sumedang, triangulasi mungkin melibatkan perbandingan antara catatan resmi pemerintah kolonial

⁷⁴ Howell, Martha, and Prevenier, "From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods," 17.

⁷⁵ Carr, *What Is History?*, 19.

dengan sumber lisan dari keturunan elite pribumi atau catatan sejarah lokal. Tosh⁷⁶ menyebutkan bahwa triangulasi adalah metode yang efektif untuk menguatkan fakta dan meminimalkan kesalahan interpretasi.

Langkah keempat adalah sintesis fakta, yaitu penggabungan fakta-fakta yang telah dikonfirmasi menjadi sebuah narasi yang koheren dan logis. Dalam proses ini, peneliti harus menyusun fakta-fakta tersebut dalam urutan yang kronologis dan analitis untuk menjelaskan peran dan kedudukan elite pribumi di Kabupaten Sumedang. Sintesis ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa semua fakta yang relevan disertakan dan diinterpretasikan dengan benar. Menurut Marwick⁷⁷, sintesis fakta sangat penting dalam penelitian sejarah karena membantu membangun gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peristiwa yang diteliti.

Langkah terakhir adalah penyajian temuan penelitian dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur. Laporan ini harus mencakup semua fakta utama yang ditemukan selama penelitian, serta penjelasan tentang bagaimana fakta-fakta ini mendukung kesimpulan yang diambil. Penyajian hasil penelitian harus memungkinkan pembaca untuk memahami logika di balik interpretasi faktual yang dilakukan oleh peneliti. White⁷⁸ menekankan bahwa penyajian yang baik harus mencerminkan ketelitian dalam proses pengumpulan dan analisis fakta, serta memberikan gambaran yang obyektif dan menyeluruh tentang topik yang diteliti.

c. Historiografi

Dalam historiografi, penulisan sejarah membutuhkan pendekatan metodologis yang ketat untuk memastikan akurasi dan objektivitas. Penelitian mengenai kedudukan elite pribumi di pemerintahan Kabupaten Sumedang antara tahun 1925-1942, misalnya, dimulai dengan pengumpulan sumber primer seperti arsip kolonial, surat kabar lokal, dan dokumen pemerintah. Analisis kritis

⁷⁶ Tosh, "The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History.," 72.

⁷⁷ Marwick, "The Nature of History," 45.

⁷⁸ White, "Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe," 67.

terhadap sumber-sumber ini diperlukan untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa tersebut. Sebagai contoh, Anderson⁷⁹

Tahap selanjutnya dalam historiografi adalah pengumpulan dan evaluasi sumber yang relevan. Dalam konteks Sumedang, sumber-sumber primer seperti laporan bupati, catatan administrasi kabupaten, dan surat-surat pribadi dari tokoh-tokoh lokal memberikan gambaran rinci tentang peran dan pengaruh elite pribumi. Sumber sekunder seperti buku dan artikel ilmiah juga penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas⁸⁰. menunjukkan bagaimana sumber sekunder dapat membantu menempatkan informasi dari sumber primer dalam konteks yang lebih besar dan memahami dinamika antara kekuasaan kolonial dan elite lokal.

Analisis kritis terhadap sumber sangat penting dalam historiografi untuk memahami bias dan agenda di balik setiap dokumen. Misalnya, dalam penelitian tentang Sumedang, perlu diperhatikan bagaimana laporan-laporan dari pejabat kolonial mungkin mencerminkan pandangan yang menguntungkan bagi kepentingan kolonial, sedangkan dokumen dari elite pribumi mungkin menunjukkan perspektif yang berbeda⁸¹. mengingatkan bahwa historiografi yang kritis harus mempertimbangkan latar belakang penulis dan konteks pembuatan dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan objektif.

Setelah analisis sumber selesai, langkah berikutnya dalam historiografi adalah menyusun narasi sejarah. Narasi ini harus disusun secara kronologis atau tematis, tergantung pada fokus penelitian. Untuk penelitian ini, narasi yang disusun bisa menggabungkan perubahan peran elite pribumi dari sekedar alat administrasi kolonial menjadi agen perubahan sosial yang lebih aktif⁸². menekankan pentingnya struktur narasi yang logis dan konsisten dalam menulis sejarah, terutama ketika membahas transformasi sosial dan politik

⁷⁹ B Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. (Ithaca: Cornell University Press, 1972), 45.

⁸⁰ A. Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*. (New Haven: Yale University Press., 1993), 102-5.

⁸¹ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 78.

⁸² Vickers, *A History of Modern Indonesia.*, 150-52.

Historiografi menjadi langkah akhir dalam prosedur penelitian sejarah, dimana penulis menyajikan temuan penelitian sejarah dalam bentuk tulisan.⁸³ Pembahasan tesis ini akan dibagi dalam lima bab yang disusun berdasarkan kronologis yang terkait satu sama lain.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan metode penelitian. Isi pokok bab ini merupakan gambaran seluruh penelitian secara garis besar, sedangkan deskripsi secara terperinci akan diuraikan dalam beberapa bab berikutnya.

Bab II Kedudukan Elite Pribumi Dalam Struktur Pemerintahan Di Kabupaten Sumedang Dalam Periode 1925-1942, yang terdiri gambaran umum wilayah Kabupaten Sumedang tahun 1925-1942 dan keterlibatan kalangan elit pribumi dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Bab III Dinamika Politik Yang Mempengaruhi Peran Dan Kedudukan Elite Pribumi Dalam Pemerintahan Lokal, yang terdiri dari perkembangan sosial politik di Kabupaten Sumedang tahun 1925-1942, kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap kalangan elite pribumi kabupaten Sumedang, dan peran elite pribumi dalam pemerintahan lokal.

Bab IV Respon Kalangan Elite Pribumi Menghadapi Tantangan Dalam Menjalankan Peran Mereka Dalam Pemerintahan Di Bawah Kekuasaan Kolonial Belanda, yang terdiri dari, tantangan yang di hadapi kalangan elite pribumi dalam pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial dan sikap kalangan elit pribumi terhadap pemerintah kolonial

Bab V Penutup, kesimpulan, saran dan diakhiri dengan daftar referensi disertai lampiran.

⁸³ Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 111.